

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Maria Regina Tobi

mariaregina@yahoo.com

Farida Idayati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to assess the financial performance of the local government of East Flores district by using financial ratio analysis to the Local Government Budget of East Flores district in 2012-2014 fiscal years. This research is case study research and descriptive approach. The analysis which has been applied to analyze the local financial performance is independency ratio, fiscal decentralization level ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, and expenditure harmony ratio. Meanwhile, the calculation of share and growth, map of local financial capacity, and financial capability index has been applied to analysis the local financial capability. Based on the result of the analysis and the calculation of local financial performance, it can be concluded that the patterns of the correlation and the local independency level of East Flores district is in instructive criteria. The fiscal decentralization level of East Flores district is still low but the effectiveness level of local financial management of East Flores district can be stated quite effective and the efficiency level of local financial management of East Flores district can be stated less efficient. The expenditure harmony ratio describes that between direct expenditure and indirect spending has not balanced yet. Based on the result of the calculation and the analysis of local financial capability, it can be concluded that the condition of the financial capability of East Flores district has not ideal yet. It can be seen from the result of the calculation of share and growth which shows that the position of East Flores district is in the Quadrant II. The financial capability of East Flores district is in high category when it is considered from the result of the calculation of financial capability index of East Flores district.

Keywords: local finance, financial ratio, local government budget, financial performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dengan menggunakan analisis rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2012-2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Analisis yang digunakan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah adalah rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja. Sedangkan analisis yang digunakan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan menghitung share dan growth, peta kemampuan keuangan daerah, dan indeks kemampuan keuangan. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan serta tingkat kemandirian daerah Kabupaten Flores Timur berada pada kriteria instruktif. Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur masih kurang namun, tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Flores Timur terbilang sangat efektif dan tingkat Efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Flores Timur terbilang kurang efisien. Rasio Keserasian Belanja menunjukkan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung yang belum seimbang. Kondisi kemampuan keuangan masih belum ideal. Dilihat dari hasil perhitungan *Share and Growth*, posisi berada pada kuadran II. Dilihat dari hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan tergolong tinggi.

Kata kunci: keuangan daerah, rasio keuangan, APBD, kinerja keuangan.

PENDAHULUAN

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Regulasi aturan-aturan tersebut dirasakan sangat menyulitkan dalam hal pelaksanaannya karena disamping butuh waktu untuk mempelajari sekaligus memahami, kendala berikutnya adalah adanya aturan-aturan pelaksanaan yang belum dikeluarkan, baik itu turunan dari Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah daerah itu sendiri sampai sekarang belum diwujudkan, tapi pemerintah tentunya tidak boleh hanya menunggu dengan tidak melaksanakan aturan yang ada. Kalau hal ini dilakukan sudah pasti ada pemeriksaan, maka akan menjadi temuan tentunya. Perubahan-perubahan aturan yang demikian cepat akan banyak menimbulkan masalah-masalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah terutama pada pertanggungjawaban akhir kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak. Tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Karena itu Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Kabupaten Flores Timur berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintahan pada masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat geram dan krisis kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Flores

Timur. Untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk menghitung Kemampuan Keuangan Daerah, yaitu dengan cara menghitung *Share* dan *Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka rumusan permasalahan adalah: 1) Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur ditinjau dari rasio keuangan selama Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014?, 2) Bagaimanakah kemampuan keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten Flores Timur selama Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014?. Sedang tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur ditinjau dari rasio keuangan selama Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014, 2) Untuk menilai kemampuan keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten Flores Timur selama Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian dan Unsur-unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Halim (2008:15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur yang terdiri dari rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2008: 15-16) adalah sebagai berikut: 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci, 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-

pengeluaran yang akan dilaksanakan, 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, 4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Dalam penyusunan APBD anggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Tahap-tahap proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut : 1) Perumusan kebijakan umum dan APBD antara pemerintah daerah dan DPRD dengan mempertimbangkan aspirasi dan masukan masyarakat, 2) Penyusunan strategi dan prioritas oleh pemerintah pusat, 3) Penyusunan RAPBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah, 4) Pembahasan RAPBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD, 5) Penetapan RAPBD dengan peraturan daerah, 6) Apabila DPRD tidak menyetujui RAPBD yang diusulkan maka dipergunakan APBD tahun sebelumnya, 7) Perubahan RAPBD ditetapkan paling lambat 3 bulan.

Struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011. Standar akuntansi pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 1) Pendapatan Daerah terdiri dari: (a) Pendapatan asli daerah (b) Dana perimbangan dan (c) Lain-lain pendapatan yang sah, 2) Belanja daerah terdiri atas: (a) Belanja administrasi umum (belanja tidak langsung), (b) Belanja operasi dan pemeliharaan (belanja langsung), (c) Belanja modal, (d) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, € Belanja tak disangka, 3) Pembiayaan

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dari semua itu, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2002:209).

APBD mempunyai fungsi utama, yaitu (UU No. 33 Tahun 2004, Pasal 66 ayat 3): 1) Fungsi Otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, 2) Fungsi Perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, 3) Fungsi Pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 4) Fungsi Alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, 5) Fungsi Distribusi, mengandung arti bahwa kebutuhan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian *integral* dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke

daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Halim (2008:23), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006, Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP Nomor 24 tahun 2005. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing SKPD yang kemudian akan dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, serta membantu ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu *manajer public* menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur *financial* maupun *nonfinancial*. Dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD, yaitu :

Rasio kemandirian keuangan daerah, Halim (2008) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar

pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Tabel 1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Rendah Sekali | 0%-25% | Instruktif |
| Rendah | 25%-50% | Konsultatif |
| Sedang | 50%-75% | Partisipasif |
| Tinggi | 75%-100% | Delegatif |

Sumber: Muhibtari (2014).

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2010), derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Tabel 2
Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

| Persentase PAD terhadap TPD(%) | Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal |
|--------------------------------|--|
| 0,00-10,00 | Sangat Kurang |
| 10,01-20,00 | Kurang |
| 20,01-30,00 | Sedang |
| 30,01-40,00 | Cukup |
| 40,01-50,00 | Baik |
| >50,00 | Sangat Baik |

Sumber: Tim Litbang Depdagri dalam (Bisma dan Susanto, 2010)

Rasio efektivitas, Halim (2008) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel 3
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

| Persentase Kinerja Keuangan (%) | Kriteria |
|---------------------------------|----------------|
| Di atas 100 | Sangat Efektif |
| 100 | Efektif |
| 90 - 99 | Cukup Efektif |
| 75 - 89 | Kurang Efektif |
| Di bawah 75 | Tidak Efektif |

Sumber: Mahmudi, 2010.

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil Rasio Efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Tabel 4
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

| Persentase Kinerja Keuangan (%) | Kriteria |
|---------------------------------|----------------|
| Di atas 40 | Tidak Efisien |
| 31 - 40 | Kurang Efisien |
| 21 - 30 | Cukup Efisien |
| 10 - 20 | Efisien |
| Di bawah 10 | Sangat Efisien |

Sumber: Mahmudi (2010).

Rasio Keserasian Belanja

Menurut Mahmudi (2010), Analisis Rasio Keserasian Belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah Daerah perlu membuat harmonisasi belanja dengan melakukan analisis Keserasian Belanja, antara lain: 1) Belanja tidak langsung adalah pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung, 2) Belanja tidak langsung dikategorikan sebagai biaya kebijakan (*discretionary expense/ expenditure*). Belanja langsung dikategorikan sebagai biaya teknik (*engineered expense/ expenditure*).

Kemampuan Keuangan Daerah

Growth mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. *Growth* dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Diawali dengan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran *Share* dan *Growth* kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran.

Share mengukur seberapa besar kontribusi PAD untuk membiayai belanja pemerintah daerah, yang mana mencerminkan potensi peningkatan kapasitas PAD dari suatu Kabupaten/Kota. *Share* merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah.

Tabel 5
Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah
Berdasarkan Metode Kuadran

| Kuadran | Kondisi |
|---------|---|
| I | Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam Total Belanja dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi. |
| II | Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi. |
| III | Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah. |
| IV | Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah. |

Sumber: Bappenas, (2003)

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Kemampuan daerah dimaksud dalam arti seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk dapat membiayai keuangan daerahnya antara lain dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang meningkat, dibandingkan dana perimbangan. Semakin besar PAD maka ketergantungan terhadap pusat akan semakin kecil dan penggunaan *surplus* anggaran kepada alokasi belanja terutama belanja untuk pengembangan infrastruktur umum daripada pengeluaran pembiayaan untuk rekening pemegang kas daerah.

Kemampuan keuangan daerah ini dapat tercermin dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tercermin dari APBD. APBD mencerminkan pelaksanaan pembangunan melalui realisasi pendapatan daerah (Dana Perimbangan, PAD), belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan.

PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat *fluktuatif* dan cenderung di luar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, daerah diharap dapat meningkatkan PAD, sambil tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas. Kinerja PAD terukur melalui ukuran *Growth*, Elastisitas, dan *Share*. Kombinasi indeksasi dan ketiga ukuran tersebut merupakan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang sekaligus digunakan dalam menilai kinerja daerah dalam pengelolaan input. Selanjutnya Bappenas menyatakan bahwa *growth* merupakan angka pertumbuhan PAD tahun *i* dan tahun *i-1*. Elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau lastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Sedangkan *share* merupakan rasio PAD terhadap belanja daerah (belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam: 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Proposisi

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan yang mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dibutuhkan anggaran biaya lebih untuk memperoleh hasil yang lebih. Setiap tahun Kabupaten Flores Timur melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki maupun menambah fasilitas umum. Pembangunan tersebut pasti berpengaruh pada besarnya jumlah dana yang dikeluarkan. Besar kecilnya rasio anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari tahun ke tahun dijadikan pembuktian apakah kinerja pemerintah daerah sudah sesuai atau belum, dilihat dari perkembangan daerah tersebut. Jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah pemerintah daerah mampu untuk mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Analisis rasio tersebut dapat dijadikan tolak ukur apakah kinerja pemerintah daerah meningkat dari tahun ke tahunnya, sehingga dapat dikatakan sebagai daerah yang berkembang. Terlebih lagi banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui secara transparan mengenai besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, serta pengaruhnya terhadap ukuran kinerja pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur tahun Anggaran 2012-2014 dan akan dianalisis menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja, *Share* dan *Growth* APBD, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Di mana perhitungan analisis ini akan digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan Kabupaten Flores Timur.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Obyek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif. Menurut Kuncoro (2009: 12), tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Data *deskriptif* pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey wawancara ataupun observasi. Data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap atau gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi keuangan daerah di Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Alasan digunakan penelitian kualitatif adalah: 1) Kesimpulan tidak dapat digeneralisasikan karena penelitian tidak menggunakan sampel tetapi dengan penelitian tunggal, 2) Tidak bertujuan menguji hipotesis

Obyek penelitian pada penulisan ini adalah Kantor Pemerintahan Kabupaten Flores Timur dengan mengambil data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan daerah dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Flores Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan faktor yang sangat penting dalam pembuatan suatu karya ilmiah yang mempunyai manfaat untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang suatu persoalan atau keadaan, selain itu data dapat juga dijadikan sebagai dasar dalam membuat

keputusan untuk memecahkan suatu persoalan. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui observasi, kegiatan wawancara, serta dokumentasi dengan jalan mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan sebagai landasan teori.

Satuan Kajian

Laporan keuangan, adalah seluruh transaksi yang dicatat dan diidentifikasi selama periode tertentu kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Dari laporan keuangan berbagai transaksi yang dilakukan telah diklasifikasi dan dianalisis sehingga dapat menjadi suatu informasi untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah. Jadi laporan keuangan tersebut merupakan dasar bagi upaya analisis atas gambaran suatu instansi. Analisis laporan keuangan, adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan kepatuhan yang tepat.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan (Sarwono, 2006:138). Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data antara lain : 1) Menghitung rasio keuangan berdasarkan data yang diperoleh, 2) Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio keuangan, 3) Menghitung Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur ditinjau dari rasio keuangan tahun 2012-2014 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja} = \frac{\text{Total belanja tidak langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i}{\text{PAD}_i - 1} \times 100\%$$

$$\text{Indeks X} = \frac{(\text{nilai x hasil pengukuran}) - (\text{nilai x kondisi minimum})}{(\text{nilai x kondisi maksimum}) - (\text{nilai x kondisi minimum})}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Flores Timur selama Tahun 2012-2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pinjaman dalam Ringkasan APBD Kabupaten Flores Timur, maka Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014 sebagai berikut :

Tabel 6
Rasio Kemandirian APBD Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2012-2014
(Dalam Rupiah)

| Tahun Anggaran | Realisasi penerimaan PAD | Bantuan Pemerintah dan Pinjaman | Rasio Kemandirian | Pola Hubungan |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 2012 | 29.107.671.569,99 | 543.213.772.122 | 5,36% | Instruktif |
| 2013 | 30.421.157.068,58 | 622.995.697.831 | 4,88% | Instruktif |
| 2014 | 44.528.326.885,99 | 710.488.234.269 | 6,27% | Instruktif |
| Rata-rata rasio kemandirian | | | 5,50% | Instruktif |

Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014 (Data Diolah)

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 6, Rasio Kemandirian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 berfluktuatif, dimana pada tahun 2013 rasio kemandirian mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan. Rata-rata Rasio Kemandirian Kabupaten Flores Timur selama periode 3 tahun sebesar 5,50%. Dengan jumlah tersebut, menurut Kategori Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah yang dituliskan oleh Halim (2008), Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dikatakan sangat rendah sekali, sehingga masuk ke dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu berkisar antara 0%-25%. Dalam pola hubungan Instruktif, peran Pemerintah Pusat lebih dominan terhadap kemandirian Pemerintah Daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012-2014, maka Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014.

Tabel 7
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2012-2014
(Dalam Rupiah)

| Tahun Anggaran | Realisasi penerimaan PAD | Total Pendapatan Daerah | Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal | Kriteria |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 2012 | 29.107.671.569,99 | 572.321.443.691,99 | 5,09% | Sangat kurang |
| 2013 | 30.421.157.068,58 | 655.602.184.274,58 | 4,64% | Sangat kurang |
| 2014 | 44.528.326.885,99 | 756.258.647.654,99 | 5,89% | Sangat kurang |
| Rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal | | | 5,20% | Sangat kurang |

Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014 (Data Diolah)

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 7, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2012 Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp29.107.671.569,99 dan Total Pendapatan Daerah Rp 572.321.443.691,99 sehingga Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Realisasi Penerimaan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 5,09%. Tahun 2013 Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 30.421.157.068,58 dan Total Pendapatan Daerah Rp 655.602.184.274,58 sehingga Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Realisasi Penerimaan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 4,64%. Tahun 2014 Realisasi Penerimaan PAD sebesar Rp 44.528.326.885,99 dan Total Pendapatan Daerah Rp 756.258.647.654,99 sehingga Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Realisasi Penerimaan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 5,89%.

Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan normatif data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012-2014, maka Rasio Efektivitas sebagai berikut :

Tabel 8
Rasio Efektivitas APBD Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2012-2014
(Dalam Rupiah)

| Tahun Anggaran | Anggaran PAD | Realisasi PAD | Rasio Efektivitas | Kriteria Rasio Efektivitas |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 2012 | 29.543.428.160.00 | 29.107.671.569,99 | 98,53% | Cukup Efektif |
| 2013 | 34.525.249.848.00 | 30.421.157.068,58 | 88,11 % | Cukup Efektif |
| 2014 | 42.194.313.000.00 | 44.528.326.885,99 | 105,53 % | Sangat Efektif |
| Rata-rata rasio efektivitas | | | 97,39% | Cukup Efektif |

Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 8, Rasio Efektivitas Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 pada awal periode, yaitu tahun 2012 Rasio Efektivitas tergolong tinggi. Kemudian di tahun berikutnya, yaitu tahun 2013, Rasio Efektivitasnya turun sebesar 88,11%. Setelah itu, pada tahun 2014 Rasio Efektivitas mengalami kenaikan kembali sebesar 105,53% .

Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012-2014, maka Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Rasio Efisiensi APBD Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2012-2014
(Dalam Rupiah)

| Tahun Anggaran | Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD | Realisasi Penerimaan PAD | Rasio Efisiensi | Kriteria Rasio Efisiensi |
|---------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 2012 | 13.412.428.160,00 | 29.107.671.569,99 | 46,08 % | Tidak efisien |
| 2013 | 16.317.249.848,00 | 30.421.157.068,58 | 53,64 % | Tidak efisien |
| 2014 | 25.104.313.000,00 | 44.528.326.885,99 | 56,38 % | Tidak efisien |
| Rata-rata rasio efisiensi | | | 52,03 | Tidak efisien |

Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014 (Data Diolah)

Dilihat dari data yang tercantum dalam Tabel 9, Rasio Efisiensi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014, Rasio Efisiensi setiap tahun menunjukkan peningkatan, dimana pada Tahun 2012 sebesar 46,08%, Tahun 2013 meningkat sebesar 53,64% dan Tahun 2014 juga meningkat sebesar 56,38%. Rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Flores Timur selama Tahun 2012-2014 masih termasuk dalam golongan tidak efisien, karena berada di atas batas minimal, yaitu 40%.

Rasio Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data total belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah dalam ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012-2014. Maka Rasio Belanja Tidak Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014 .

Tabel 10
Rasio Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2012-2014
(Dalam Rupiah)

| Tahun Anggaran | Total Belanja Tidak Langsung | Total Belanja Daerah | Rasio Belanja Tidak Langsung |
|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 2012 | 379.952.382.293 | 650.409.184.010. | 58,42 % |
| 2013 | 397.130.565.691 | 647.472.381.511 | 61,34 % |
| 2014 | 485.795.172.800 | 803.031.408.000 | 39,50 % |
| Rata-rata rasio belanja tidak langsung | | | 53,09 |

Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014 (Data Diolah)

Dilihat dari data yang tercantum dalam Tabel 10, Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2013, Rasio Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar 58,42% dan 61,34%, sedangkan Tahun

Anggaran 2014 Rasio Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan menjadi 39,09%. Rata-rata Rasio Belanja Tidak Langsung selama Tahun 2012-2014 sebesar 53,09%.

Data tersebut secara rinci menunjukkan bahwa tahun 2012 Total Belanja Tidak Langsung Rp 379.952.382.293 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 650.409.184.010, sehingga Rasio Belanja Tidak Langsung sebesar 58,42%. Tahun 2013 Total Belanja Tidak Langsung Rp 397.130.565.691 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 647.472.381.511, sehingga Rasio Belanja Tidak Langsung sebesar 61,34%. Tahun 2014 Total Belanja Tidak Langsung Rp 485.795.172.800 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 803.031.408.000, sehingga Rasio Belanja Tidak Langsung sebesar 39,50%.

Rasio Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Total Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012-2014, maka Rasio Belanja Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 11
Rasio Belanja Langsung APBD Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2012-2014
(Dalam Rupiah)

| Tahun Anggaran | Total Belanja Langsung | Total Belanja Daerah | Rasio Belanja Langsung |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 2012 | 270.456.801.717 | 650.409.184.010 | 41,58 % |
| 2013 | 250.341.815.820 | 647.472.381.511 | 38,66 % |
| 2014 | 485.795.172.800 | 803.031.408.000 | 60,50 % |
| Rata-rata rasio belanja langsung | | | 46,91 |

Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014 (Data Diolah)

Dilihat dari data yang tercantum dalam Tabel 11, Belanja Langsung Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014, pada 2013 Rasio Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar 38,66%, tetapi pada periode selanjutnya, yaitu tahun 2014, Rasio Belanja Langsung mengalami kenaikan sebesar 60,50%. Rata-rata Rasio Belanja Langsung Kabupaten Flores Timur selama periode 3 tahun sebesar 46,91%. Ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur lebih sedikit menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Langsung dibandingkan untuk Belanja Tidak Langsung.

Data tersebut secara rinci menunjukkan bahwa tahun 2012, Total Belanja Langsung Rp 270.456.801.717 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 650.409.184.010, sehingga Rasio Belanja Langsung sebesar 41,58%. Tahun 2013 Total Belanja Langsung Rp 250.341.815.820 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 647.472.381.511, sehingga Rasio Belanja Langsung sebesar 38,66%. Tahun 2014 Total Belanja Langsung Rp 485.795.172.800 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp 803.031.408.000, sehingga Rasio Belanja Langsung sebesar 60,50%.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kinerja keuangan daerah Kabupaten Flores Timur selama Tahun 2012-2014 yang diukur dengan rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian belanja tersaji pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2012 - 2014

| No | Keterangan | Tahun | | | Rata-rata | Kecenderungan |
|----|---|--------|---------|----------|-----------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| 1 | Rasio kemandirian | 5.36% | 4.88% | 6.27% | 5.50% | Instruktif |
| 2 | Rasio derajat desentralisasi fiskal | 5.09% | 4.64% | 5.89% | 5.20% | Sangat kurang |
| 3 | Rasio efektivitas | 98.53% | 88.11 % | 105.53 % | 97.39% | Efektif |
| 4 | Rasio efisiensi | 46.08% | 53.64% | 56.38% | 52.03% | Kurang efisien |
| 5 | Rasio keserasian belanja langsung | 41,58% | 38,66% | 60,50% | 46,91% | Belum stabil- |
| 6 | Rasio keserasian belanja tidak langsung | 58,42% | 61,34% | 39,50% | 53,09% | Belum stabil |

Sumber: Data Sekunder Kinerja Keuangan Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014 (diolah)

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Share merupakan rasio PAD terhadap Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan daerah membiayai kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan. Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012-2014, maka *share* Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014.

Tabel 13
Share APBD Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2012-2014
(Dalam Rupiah)

| Tahun Anggaran | PAD | Total Belanja | Nilai |
|------------------------|-------------------|------------------|-------|
| 2012 | 29.107.671.569,99 | 650.409.184.010. | 4,47% |
| 2013 | 30.421.157.068,58 | 647.472.381.511 | 4,79% |
| 2014 | 44.528.326.885,99 | 803.031.408.000 | 5,54% |
| Rata-rata <i>share</i> | | | 4,91% |

Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014 (Data Diolah)

Dilihat dari data yang tercantum dalam Tabel 18 *share*, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, pada 2012 *share* sebesar 4,47%, pada tahun 2013, *share* mengalami sebesar 4,79% sedang pada tahun 2014 *share* juga mengalami peningkatan kembali sebesar 5,54%. Rata-rata *share* Kabupaten Flores Timur selama periode 3 tahun sebesar 4,91%. Ini berarti kemampuan daerah membiayai belanja daerah dapat dilihat dari rasio antara PAD dengan APBD. belum mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja daerahnya.

Growth merupakan angka pertumbuhan PAD tahun *i* dari tahun *i-1*. Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012-2014, maka *growth* Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014.

Tabel 14
Growth APBD Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2012-2014
(Dalam Rupiah)

| Tahun Anggaran | Realisasi PAD | Growth |
|------------------|-------------------|---------|
| 2012 | 29.107.671.569,99 | 101,47% |
| 2013 | 30.421.157.068,58 | 104,51% |
| 2014 | 44.528.326.885,99 | 146,37% |
| Rata-rata Growth | | 117,45% |

Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2014 (Data Diolah).

Dilihat dari data yang tercantum dalam Tabel 14 *growth*, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, pada 2012 *growth* sebesar 101,47%, pada tahun 2013, *growth* mengalami peningkatan sebesar 104,51% sedang pada tahun 2014 *share* juga mengalami peningkatan kembali sebesar 146,37%. Rata-rata *growth* Kabupaten Flores Timur selama periode 3 tahun sebesar 117,45%. Ini berarti pertumbuhan PAD tahun bersangkutan besar jika dibandingkan tahun sebelumnya sehingga daerah bisa mandiri karena dana transfer akan semakin kecil seiring dengan tingginya PAD, di Kabupaten Flores Timur terlihat pertumbuhan PAD menunjukkan peningkatan sehingga sangat stabil tentunya dalam menggali potensi pendapatan dan mengoptimalkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada.

Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Dari hasil perhitungan *Share* dan *Growth* terhadap Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014, maka diperoleh data rata-rata *share* sebesar 4,91% dan rata-rata *growth* sebesar 117,45%. Kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran, posisi Kabupaten Flores Timur berada pada kuadran II, yaitu Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja. Sumbangan PAD terhadap total belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur masih dapat menggali potensi daerah lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD.

Kabupaten Flores Timur memiliki tempat wisata yang banyak diminati masyarakat, sehingga banyak sekali pelayanan jasa yang dibangun di Kabupaten Flores Timur, seperti jasa perhotelan, swalayan, hingga jasa parkir. Jika dapat mengelola potensi daerah yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dapat meningkatkan kinerjanya untuk menambah PAD pada periode selanjutnya. Kabupaten Flores Timur sendiri terkenal dengan sebutan sebagai Kota Jasa. Hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi yang didapatkan dari pembayaran pelayanan penjualan jasa di Kabupaten Flores Timur. Karena pajak dan retribusi merupakan pemberi kontribusi utama dalam meningkatkan PAD.

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Indeks kemampuan keuangan merupakan nilai rata-rata dari ketiga indeks tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin mendekati 1 berarti daerah yang bersangkutan dalam hal kemampuan keuangannya semakin mandiri sedangkan semakin mendekati 0 maka semakin tergantung kepada pemerintah pusat.

Indeks Elastisitas

Indeks Elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja langsung bertujuan untuk melihat elastisitas atau sensitivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah perhitungan Indeks Elastisitas Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014.

Tabel 15
Indeks Elastisitas APBD Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2012-2014
(Dalam Rupiah)

| Tahun Anggaran | Nilai (%) | Kondisi Maksimal (%) | Kondisi minimal (%) | Indeks (%) |
|----------------|-------------|----------------------|---------------------|------------|
| 2012 | 0,220266459 | 0,263797494 | 0,220266459 | 0,457 |
| 2013 | 0,260814328 | 0,263797494 | 0,220266459 | 0,689 |
| 2014 | 0,263797494 | 0,263797494 | 0,220266459 | 1,361 |
| Jumlah | | | | 2,507 |

Sumber: APBD Kab. Flores Timur Tahun 2012-2014 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui rata-rata indeks elastisitas selama tahun 2012-2014 sebesar 2,507%. Setiap tahunnya indeks elastisitas menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2012 indeks elastisitas sebesar 0,457%, di tahun 2013 meningkat kembali menjadi 0,689% dan pada Tahun 2014 juga meningkat menjadi 1,361%.

Indeks Share

Indeks *Share* PAD terhadap Total belanja memperlihatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan Biaya Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Berikut ini adalah perhitungan Indeks *Share* Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014:

Tabel 15
Indeks Share APBD Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2012-2014
(Dalam Rupiah)

| Tahun Anggaran | Nilai (%) | Kondisi Maksimal (%) | Kondisi minimal (%) | Indeks (%) |
|----------------|-------------|----------------------|---------------------|------------|
| 2012 | 0,099422257 | 0,119787832 | 0,099422257 | 0,364 |
| 2013 | 0,119787832 | 0,119787832 | 0,099422257 | 0,810 |
| 2014 | 0,115387872 | 0,119787832 | 0,099422257 | 0,714 |
| Jumlah | | | | 1,888 |

Sumber: APBD Kab. Flores Timur Tahun 2012-2014 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui rata-rata indeks *share* selama tahun 2012 - 2014 sebesar 1,888%. Pada Tahun 2012 indeks *share* sebesar 0,364%, di tahun 2013 meningkat menjadi 0,810% dan pada Tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 0,714%.

Indeks Growth

Perhitungan Indeks *Growth* memperlihatkan bagaimana pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah perhitungan Indeks *Growth* Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014.

Tabel 16
Indeks *Growth* APBD Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2012-2014
(Dalam Rupiah)

| Tahun Anggaran | Realisasi PAD | Kondisi Maksimal (Rp) | Kondisi minimal (Rp) | Indeks (%) |
|----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 2012 | 29.107.671.569,99 | 44.528.326.885,99 | 29.107.671.569,99 | 0,158 |
| 2013 | 30.421.157.068,58 | 44.528.326.885,99 | 29.107.671.569,99 | 0,345 |
| 2014 | 44.528.326.885,99 | 44.528.326.885,99 | 29.107.671.569,99 | 0,540 |
| Jumlah | | | | 1,043 |

Sumber: APBDKab. Flores Timur Tahun 2012-2014 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 16, dapat diketahui rata-rata indeks *growth* selama tahun 2012–2014 sebesar 0,043%. Setiap tahunnya indeks *growth* menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2012 indeks *growth* sebesar 0,158%, di tahun 2013 meningkat kembali menjadi 0,345% dan pada Tahun 2014 juga meningkat menjadi 0,540%.Dilihat dari hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014, skala indeks menunjukkan angka 1,043. Ini berarti Kemampuan Keuangan Kabupaten Flores Timur tergolong tinggi. Artinya, tingginya tingkat kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur disebabkan oleh besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang tercantum pada Analisis Rasio Kemandirian yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur memiliki tingkat kemandirian yang sangat rendah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah yang menuntut kemandirian dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dan analisis Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Kabupaten Flores Timur berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Ini terlihat dari hasil rata-rata Rasio Kemandirian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012-2014, berdasarkan pengolahan data yang berasal dari Ringkasan Laporan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012-2014 adalah sebesar 5,50%. Ini menunjukkan bahwa, peran Pemerintah Pusat sangat dominan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Mengingat peran Pemerintah Pusat yang masih sangat dominan, wajar jika Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur masih kurang. Ini terlihat dari rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama periode 3 tahun hanya berjumlah 5,20%. Artinya, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang kecil kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Namun, tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Flores Timur terbilang cukup efektif dan tidak efisien. Ini terlihat dari tingginya angka rata-rata Rasio Efektivitas yang berjumlah 97,39% dan rendahnya angka rata-rata Rasio Efisiensi yang berjumlah 52,03% selama periode 3 tahun anggaran. Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bahwa keseimbangan antar belanja belum seimbang. Terbukti dari perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan

dengan kegiatan Belanja Langsung. Semestinya Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan Kabupaten Flores Timur masih belum ideal. Dilihat dari hasil perhitungan *share* dan *growth* terhadap Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014, maka diperoleh data *Share* sebesar 4,91% dan *Growth* sebesar 117,45%, sehingga posisi Kabupaten Flores Timur berada pada kuadran II yang berarti berada pada kondisi belum ideal. Tandanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur masih harus menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki daerah, sehingga lebih dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD.

Dilihat dari hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Kabupaten Flores Timur selama periode 3 tahun, skala indeks menunjukkan angka 0,528525 yang berarti kemampuan keuangan Kabupaten Flores Timur tergolong tinggi. Tingginya tingkat kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur disebabkan oleh besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang ditunjukkan pada analisis rasio kemandirian. Hal ini sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah yang menuntut kemandirian dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya.

Saran

Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Flores Timur, karena mempunyai dampak yang besar, tidak hanya bagi Pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat. Potensi tersebut antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, budaya, hingga perdagangan. Jika Pemerintah berhasil memaksimalkan pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal, maka pajak yang merupakan penopang utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah hendaklah memberi informasi secara rinci kepada masyarakat tentang kewajiban mereka sebagai pembayar pajak dan retribusi, karena tidak semua masyarakat mengetahui rincian kewajiban jumlah pajak dan retribusi yang harus dibayarkan. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi supaya tidak terjadi kecurangan. Karena besarnya pajak dan retribusi tidak hanya sebagai komponen utama untuk meningkatkan PAD, tetapi juga sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja secara normatif, keseimbangan antar belanja belum menunjukkan kata seimbang. Pemerintah Daerah seharusnya lebih cenderung menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal untuk meningkatkan kualitas output, sehingga fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur harus mengurangi ketergantungan terhadap dana bantuan dari Pemerintah Pusat, agar dapat mencapai kondisi tingkat kemampuan keuangan yang ideal. Caranya, dengan mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk mengurangi besarnya dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah dan Solihin, 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 : Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta:
- Muhibtari, A. N. 2014. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 : *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2008 : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian kuantitatif & kualitatif*, Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sijabat, M. Y., C. Saleh, dan A. Wachid. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012) *Jurnal Administrasi Publik* 2(2): 236-242.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 : *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.